

## **KEBIJAKAN ASTROPOLITIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEPENTINGAN NASIONAL MELALUI DIPLOMASI ANTARIKSA PADA UNISPACE+50 TAHUN 2018**

**Dhimas Brian Hestungkoro<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

This thesis examines Indonesia's use of space diplomacy at UNISPACE+50 in 2018 to advance national objectives through astropolitical policy. In addition to presenting space-related issues to the general public from an international relations perspective, this research seeks to determine how Indonesia utilizes space diplomacy to further its national interests in international forums. The research employs a qualitative data collection method, drawing from primary and secondary sources through literature reviews, interviews, and discussions. The study finds that Indonesia aims to promote specific national interests, particularly in space exploration, with its astropolitical policies in international space forums reflecting these objectives. This research applies the concepts of space diplomacy, national interest, and astropolitics to analyze the topic. The findings indicate a gap between how industrialized and developing nations utilize outer space, primarily due to resource limitations and restricted access. However, Indonesia still has significant opportunities for growth, particularly in space exploration, where it can fully realize its potential through international space collaboration..

**Keywords:** Astropolitics, Space Diplomacy, National Interest, UNISPACE+50

### **ABSTRAK**

Tesis ini mengkaji penggunaan diplomasi antariksa oleh Indonesia di UNISPACE+50 pada tahun 2018 untuk memajukan tujuan nasional melalui kebijakan astropolitik. Selain menyajikan isu-isu luar angkasa kepada masyarakat umum dari sudut pandang hubungan internasional, penelitian ini mencoba untuk memastikan bagaimana Indonesia menggunakan diplomasi luar angkasa untuk memajukan kepentingan nasionalnya di forum internasional. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah kualitatif, dengan mengambil sumber-sumber primer dan sekunder melalui tinjauan literatur, wawancara, dan percakapan. Para peneliti menemukan bahwa Indonesia berupaya untuk memajukan kepentingan nasional tertentu, khususnya dalam eksplorasi ruang angkasa. Kebijakan astropolitik Indonesia dalam forum antariksa internasional memantapkan kepentingan-kepentingan tersebut. Penelitian ini menggunakan gagasan diplomasi ruang angkasa, kepentingan nasional, dan astropolitik untuk menganalisis hal ini. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam cara negara industri dan negara berkembang menggunakan ruang angkasa, dan bahwa penyebab utama dari ketidakseimbangan ini adalah kurangnya sumber daya dan akses yang terbatas. Namun, Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang, terutama di bidang eksplorasi ruang angkasa,

di mana Indonesia dapat sepenuhnya mewujudkan potensinya melalui kolaborasi ruang angkasa internasional.

**Kata Kunci:** Astropolitik, Diplomasi Antariksa, Kepentingan Nasional, UNISPACE+50

## **PENDAHULUAN**

Globalisasi telah meningkatkan partisipasi berbagai negara dalam eksplorasi ruang angkasa, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga menimbulkan risiko keamanan baru. Teknologi antariksa kini berperan penting dalam berbagai sektor, termasuk hukum, sosial, ekonomi, dan politik, serta semakin dibutuhkan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia (Syahreza, 2017). Dengan meningkatnya jumlah satelit di orbit, persaingan global dalam pemanfaatan sumber daya antariksa juga semakin ketat. Negara-negara besar seperti AS, Cina, dan Rusia berlomba menguasai teknologi antariksa demi kepentingan strategis mereka.

Indonesia, yang tengah berkembang, juga berupaya menguasai teknologi antariksa untuk meningkatkan posisi politik dan ekonominya di tingkat global. PBB berperan dalam mendorong kerja sama internasional guna memastikan eksplorasi luar angkasa dilakukan secara damai dan berkelanjutan. Diplomasi luar angkasa menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan mencegah konflik di luar angkasa. Indonesia telah aktif dalam berbagai forum internasional seperti UNISPACE+50 dan UNCOPUOS untuk memperjuangkan pemanfaatan ruang angkasa yang damai dan berkeadilan.

Kebijakan diplomasi luar angkasa Indonesia didasarkan pada UU Keantariksaan Nomor 21 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017, yang tertuang dalam Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan (Renduk Keantariksaan) 2016-2040. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pengembangan sektor antariksa nasional, sejalan dengan kepentingan strategis Indonesia dalam memperkuat peran globalnya di bidang keantariksaan (Heriyanto, Putro, & Asyari, 2019).

## **KERANGKA ANALITIK**

### **Konsep Astropolitik**

Astropolitik atau metageopolitik adalah cabang geopolitik yang mempelajari ruang angkasa dengan pendekatan komprehensif, mencakup aspek sosial, politik, keamanan, ekonomi, dan diplomasi, Konsep ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara

program ruang angkasa dan kepentingan politik suatu negara, termasuk keuntungan ilmiah, ekonomi, dan sosialnya (Nayef 2012). Dalam konteks Indonesia, astropolitik berperan dalam proses pengambilan keputusan keantariksaan, di mana kebijakan ruang angkasa sangat bergantung pada otoritas pembuat kebijakan dan kepentingan nasional.

### **Konsep Diplomasi Antariksa**

Diplomasi, menurut Berridge, adalah upaya politik untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingan melalui negosiasi damai tanpa kekerasan. Seiring waktu, diplomasi semakin kompleks, termasuk dalam bidang ruang angkasa (Berridge, 2010).

Diplomasi ruang angkasa adalah upaya negara untuk menegosiasikan perjanjian demi kepentingan nasional melalui pemanfaatan sumber daya ruang angkasa. Whiting menekankan bahwa aset ruang angkasa dapat memperkuat diplomasi, dengan tujuh area kekuatan yang telah diidentifikasinya (Whitting, 2012). Tujuan diplomasi ruang angkasa adalah menyelaraskan kepentingan berbagai negara dan menciptakan kerja sama harmonis di ruang angkasa. Konsep ini relevan dengan analisis keuntungan diplomasi ruang angkasa Indonesia di UNISPACE+50 untuk mencapai kepentingan nasional.

### **Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional menjadi kerangka utama dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara serta menilai efektivitasnya. Mintz dan DeRouen Jr. membandingkan analisis kebijakan luar negeri dengan permainan catur, di mana negara bertindak berdasarkan strategi tertentu untuk mencapai tujuannya (Mintz & DeRouen Jr, 2010). Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang mencakup keamanan, ekonomi, politik, dan teknologi, serta memiliki kebebasan dalam menetapkan kebijakan luar negeri. Namun, mereka juga harus menghormati kepentingan negara lain demi stabilitas global.

Nuechterlein mengidentifikasi empat prinsip kepentingan nasional: (1) Kepentingan Pertahanan, terkait perlindungan dari ancaman eksternal; (2) Kepentingan Ekonomi, berfokus pada pertumbuhan ekonomi melalui hubungan internasional; (3) Kepentingan Tatanan Dunia, yakni menjaga sistem ekonomi dan politik yang menguntungkan; serta (4) Kepentingan Ideologi, yaitu melindungi nilai-nilai negara dari pengaruh luar (Nuechterlein, 1976). Konsep ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan luar negeri sejak era George Washington hingga Hans Morgenthau (Edmunds, Porter, & Gaskarth, 2014).

## **METODE PENELITIAN**

Penulis penelitian ini mengumpulkan data kualitatif dari sumber-sumber primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data studi literatur. Studi literatur mengacu pada pemeriksaan teks-teks resmi pemerintah, teks-teks ilmiah, dan berita-berita terkemuka dari sumber-sumber resmi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, untuk mengolah data yang diperoleh, yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan data dengan menggunakan kerangka teori yang ada. Penjelasan dan analisis ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian dan menjelaskan fakta-fakta berdasarkan data yang tersedia. penelitian ini dapat memeriksa data dengan menghubungkan data yang sudah ada secara metodis dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang dibahas. Data yang dikumpulkan dari hasil sumber-sumber literatur dihubungkan dengan isu-isu terkini dengan menggunakan konsep-konsep dalam hubungan internasional, khususnya astropolitik, kepentingan nasional, dan diplomasi luar angkasa.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Kebijakan Astropolitik Indonesia dalam UNISPACE+50**

#### **1. Kebijakan Astropolitik Indonesia dalam UNISPACE+50**

Indonesia telah menerapkan strategi diplomasi luar angkasa, termasuk keterlibatannya dalam UNISPACE+50, dengan mengadopsi pendekatan astropolitik. Astropolitik, sebagaimana dijelaskan oleh Dolman, menghubungkan studi strategis, doktrin militer, dan dinamika politik dalam kebijakan luar angkasa (Dolman, 2002). Kebijakan luar negeri Indonesia di bidang keantariksaan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti konstelasi politik global serta faktor internal seperti keamanan dan ekonomi.

Indonesia memiliki potensi besar dalam keantariksaan berkat lokasi geografis strategisnya di garis khatulistiwa, yang ideal untuk peluncuran roket. Kebijakan luar negeri Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 37 Tahun 1999, berlandaskan prinsip bebas dan proaktif. Indonesia berusaha mengadvokasi akses ruang angkasa yang adil di tengah dominasi negara-negara maju seperti AS, Rusia, dan China yang terlibat dalam perlombaan teknologi ruang angkasa dan penguasaan slot orbit (Rafikasari, 2021).

Saat ini, mayoritas satelit di orbit dimiliki oleh negara-negara besar, sementara sebelum 2018, Indonesia hanya memiliki tujuh satelit aktif. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakadilan dalam pemanfaatan ruang angkasa yang seharusnya menjadi milik bersama

sesuai prinsip *Outer Space Treaty 1967*. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan diplomasi keantariksaan untuk memperjuangkan kesetaraan akses terhadap teknologi satelit, terutama dalam bidang telekomunikasi dan keamanan.

Di tingkat internasional, Indonesia terus mengadvokasi batas dan hukum ruang angkasa yang belum memiliki kesepakatan universal. UU No. 43 Tahun 2008 menetapkan batas ruang angkasa Indonesia di ketinggian 110 km, tetapi masih menjadi perdebatan dalam forum internasional. Selain itu, konflik terkait penggunaan orbit geostasioner (GSO) menjadi perhatian, karena mekanisme alokasinya lebih menguntungkan negara maju. Oleh sebab itu, Indonesia harus terus berperan aktif dalam UNISPACE+50 untuk mengadvokasi keadilan dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa.

## **2. Peran Diplomasi Antariksa Indonesia dalam UNISPACE+50**

UNISPACE+50 merupakan konferensi tingkat tinggi PBB tentang antariksa yang diadakan pada 18-21 Juni 2018 di Wina, Austria. Acara ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola global dan pemanfaatan antariksa demi pembangunan berkelanjutan. Simposium dan diskusi panel membahas berbagai topik, termasuk peran ruang angkasa dalam industri, keterlibatan perempuan dan pemuda, serta diplomasi antariksa. Agenda Space2030 menjadi fokus utama dalam mengarahkan kebijakan dan kolaborasi internasional di bidang antariksa. Indonesia aktif dalam UNISPACE+50, terutama dalam mendukung resolusi yang menegaskan pemanfaatan ruang angkasa untuk kepentingan bersama, akses yang adil, serta penguatan kolaborasi global. Thomas Djamaluddin, selaku Kepala LAPAN, ditunjuk sebagai Wakil Ketua UNCOPUOS 2018-2019. Indonesia menekankan pentingnya akses negara berkembang terhadap sumber daya antariksa, termasuk orbit geostasioner, serta pemanfaatan teknologi ruang angkasa dalam sektor penanggulangan bencana, kesehatan, pendidikan, maritim, dan ekonomi.

Diplomasi antariksa menjadi strategi utama Indonesia dalam meningkatkan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Pemerintah juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas negara berkembang dalam teknologi antariksa dan memastikan bahwa eksplorasi luar angkasa tetap berorientasi pada perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif Indonesia dalam UNISPACE+50 menunjukkan komitmennya terhadap pemanfaatan ruang angkasa yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

## **Kepentingan Nasional Indonesia pada UNISPACE+50**

Konsep kepentingan nasional telah lama digunakan untuk menganalisis kebijakan

luar negeri suatu negara, termasuk oleh George Washington dan Hans Morgenthau. Nuechterlein mengidentifikasi empat aspek utama kepentingan nasional: pertahanan, ekonomi, tatanan global, dan ideologi. Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya melimpah, aktif mengejar kepentingan nasionalnya di bidang keantariksaan. Hal ini mencakup kerja sama internasional, investasi asing, pengembangan teknologi antariksa, serta pemanfaatan ruang angkasa yang damai dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip UUD 1945. Rencana Keantariksaan 2016-2040 mendukung tujuan ini.

Indonesia juga berpartisipasi dalam UNISPACE+50 untuk memperjuangkan pemanfaatan ruang angkasa secara adil dan berkelanjutan serta memperkuat kolaborasi global. Undang-Undang Keantariksaan No. 21 Tahun 2013 menjadi landasan hukum dalam pengelolaan kegiatan antariksa, mencakup aspek keamanan, keselamatan, kerja sama internasional, serta perlindungan lingkungan. Dari perspektif hubungan internasional, kebijakan antariksa Indonesia memiliki signifikansi strategis dalam bidang sains, teknologi, komersialisasi, dan politik keantariksaan. Pemerintah terus berperan dominan dalam pengembangan sektor ini, sejalan dengan tujuh prioritas tematik UNISPACE+50, guna memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global.

### **1. Keamanan dan Kedaulatan Ruang Angkasa**

Indonesia memiliki kepentingan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan ruang angkasanya. Dalam Hubungan Internasional, ruang angkasa dianggap sebagai dimensi baru dalam keamanan global, terutama terkait dengan satelit komunikasi, pemetaan geografis, dan sistem navigasi yang krusial bagi pertahanan negara. Partisipasi Indonesia dalam UNISPACE+50 adalah upaya untuk terlibat dalam pembentukan aturan global terkait ruang angkasa guna melindungi kepentingan kedaulatan nasionalnya (Raymond & Sihombing, 2019).

### **2. Pengembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan**

UNISPACE+50 berfokus pada pemanfaatan ruang angkasa untuk perdamaian dan pembangunan, termasuk mendorong penggunaan teknologi ruang angkasa bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Bagi Indonesia, memanfaatkan teknologi satelit untuk pengawasan sumber daya alam, perubahan iklim, dan mitigasi bencana menjadi prioritas penting. Partisipasi dalam forum internasional ini membuka peluang kerja sama dan transfer teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional (Supancana, 2020).

### **3. Pembangunan Berkelanjutan**

Indonesia berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam konteks UNISPACE+50, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi ruang angkasa untuk mendukung berbagai agenda SDGs seperti pengelolaan sumber daya alam, pertanian berkelanjutan, dan penanggulangan bencana. Dalam perspektif Hubungan Internasional, ini merupakan bagian dari diplomasi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara melalui kerja sama internasional (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

### **4. Kerja Sama Global dan Posisi di Forum Internasional**

Keikutsertaan Indonesia dalam UNISPACE+50 juga mencerminkan kepentingan diplomasi multilateral. Sebagai negara berkembang yang aktif di berbagai forum internasional, Indonesia berupaya memperkuat perannya dalam pengaturan global terkait ruang angkasa. Hal ini membantu membangun citra positif Indonesia di panggung internasional, memperkuat aliansi, serta mempengaruhi kebijakan global yang sejalan dengan kepentingan nasional (Soejoeti, 2018).

### **5. Pemberdayaan Teknologi untuk Keamanan Non-Tradisional**

Dalam konteks hubungan internasional yang dinamis, ancaman keamanan non-tradisional seperti bencana alam, perubahan iklim, dan krisis pangan menjadi isu strategis. Teknologi ruang angkasa menawarkan solusi untuk pemantauan perubahan lingkungan dan manajemen sumber daya, yang sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Melalui UNISPACE+50, Indonesia memperkuat kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan ini (Nainggolan, 2018).

## **KESIMPULAN**

Indonesia telah aktif dalam bidang keantariksaan sejak 1960 dan menjadi pemain utama di sektor ini. Melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Indonesia berperan dalam kegiatan antariksa domestik dan global. Indonesia juga menjabat sebagai wakil ketua Komite PBB untuk Penggunaan Damai Antariksa (UNSPACE) serta menjalin kerja sama internasional dalam eksplorasi ruang angkasa.

Regulasi terkait keantariksaan diatur dalam UU No. 21 Tahun 2013 dan Perpres No. 45 Tahun 2017, yang menetapkan kepentingan nasional dan Rencana Induk Keantariksaan 2016-2040. Indonesia juga aktif dalam diplomasi antariksa, seperti pada konferensi UNISPACE+50 tahun 2018 di Wina. Delegasi yang dipimpin oleh Thomas

Djamaluddin membahas akses yang adil terhadap sumber daya antariksa, terutama Orbit Geostasioner (GSO), serta pendidikan dan pelatihan keantariksaan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menyoroti ketidaksetaraan antara negara maju dan berkembang dalam pemanfaatan ruang angkasa. Indonesia berkomitmen untuk mendorong kolaborasi internasional dan pemanfaatan antariksa yang adil, damai, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: konsep, target, dan strategi implementasi*. Jatinangor: UNPAD Press.
- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy: Theory and Practice, 2nd ed.* New York: Palgrave.
- Dolman, E. (2002). *Astropolitics: Classical Geopolitics in The Space Age*. London: Frank Cass.
- Edmunds, T., Porter, R., & Gaskarth, J. (2014). *British Foreign Policy and the National Interest*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Mintz, A., & DeRouen Jr, K. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge: Cambridge University.
- Nainggolan, P. P. (2018). *Aktor non-negara: kajian implikasi kejahatan transnasional di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soejoeti, M. I. (2018). *Analisis Kebijakan Astropolitik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepentingan Nasional Melalui Diplomasi Antariksa Pada Unispace+ 50 Tahun 2018*. Jakarta: Bachelor's Thesis, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Supancana, I. B. (2020). *Konsep-Konsep Dasar Hukum Internasional dan Hukum Antariksa Internasional*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

## **Jurnal**

- Heriyanto, D. S., Putro, Y., & Asyari, H. (2019). Space Diplomacy as A Way To Face The Era of Space Commercialization in Indonesia. *SINAS KPA III*, 171.
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*, 246 - 266.
- Rafikasari, A. (2021). Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Kerja Sama Keantariksaan dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal KPPA*, 27 - 41.
- Raymond, J., & Sihombing, P. (2019). Kedaulatan Negara Indonesia Dalam Udara dan Angkasa. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Comune Rusia*, 2.
- Syahreza, D. (2017). Program Keantariksaan dan Rasionalisasinya Berdasarkan Kepentingan Politik Negara. *Edisi Khusus Buletin KKPA: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa*, 54 - 57.
- Whitting, S. N. (2012). Policy, Influence, and Diplomacy: Space as a National Power Element. . *Air University (U.S), School of Advance Airpower Studies*.